



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JUSMARAMDHANA ALUS**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **646255**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.900.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **900.000.000**

1. MOBIL, HONDA JEEP Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **78.300.000**

D. SURAT BERTAHAGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.196.342.553**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **30.000.000**

Sub Total **Rp.** **8.104.642.553**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **8.104.642.553**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : EUIS EKA APRIL YANI
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 448745

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	600.000.000
1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	100.000.000
1. MOBIL, SUZUKI MOPE/MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.783.426
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	704.783.426
III. HUTANG	Rp.	74.455.955
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	630.327.471

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YONATHAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 137537

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	675.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 476 m2/476 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	85.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH TYPE G Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
2. MOTOR, HONDA SPD-MOTOR/SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	5.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	768.700.000
III. HUTANG	Rp.	154.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	614.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AKHMAD YANI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DINAS SOSIAL
3. NHK : 489592

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m²/8 m² di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 12.000.000

1. MOTOR, HONDA SPD-MTR/SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.399.263

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 292.399.263

III. HUTANG Rp. 67.571.763

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 224.827.500

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : MOHAMAD RIZAL
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 491575

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	600.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/19 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	70.000.000
1. MOBIL, ISUZU TBR541/MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	690.000.000
III. HUTANG	Rp.	140.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	550.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ENY RUSTIANI BARRY
- Jabatan** : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
- NHK** : 478011

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	9.000.000
1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp.	9.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.000.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	965.700.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.004.700.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.004.700.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGNI KASMARANWATI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN
3. NHK : 450099

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.620.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 1.120.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	222.400.000
1. MOTOR, HONDA NC1 10 D AT (VARIO) Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
2. MOTOR, YAMAHA 1 YD SPD-MTR/SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000		
3. MOTOR, HONDA F1C02N28LO SPD-MTR/SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
4. MOTOR, HONDA X1HO2N35M1 A/T SPD-MTR/SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
5. MOBIL, MITSUBISHII XPANDER EXCITEED MOPEN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.844.400.000



III. HUTANG

Rp. 119.078.290

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.725.321.710

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERY KURNIAWAN
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3. NHK : 713230

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 7.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SOLO Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.390.548

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 713.390.548

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 713.390.548

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.